

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Barda NawawiArief, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Barda NawawiArief,*Beberapa aspek kebijakan Penegakan Hukum danPengembangan Hukum Pidana*,Citra aditya Bakti, Bandung, 2005.

Barda NawawiArief,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.

Sudharto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Poedjowijatna, Lili Rasjidi, IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar maju, Bandung, 2003.

Prasetyo, Teguh dan Abdul HakimBarkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*Edisi-1 Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya*,Politeia, Bogor, 1983.

Salim HS, *Dasar-dasar hukum kehutanan* halaman 40, Sinar Grafika 2003

Rahmi hidayati, *hukum lingkungan*, wana aksara 2006

Drs. Syarmin Syukur. 1993. *Sumber-sumber hokum islam*, Al-Ikhlash. Surabaya

Dwidja, Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban*

Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, 2004.

Hamdan, M., *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Ratifikasi atas konvensi PBB tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

C. INTERNET

Definisimu.blogspot.com/2012/11/definisi-**strategi**.html

Internet, check and balance system, tgl 30 april 2016

www.**arti**-definisi.com/**Pencegahan**

pengertian-pengertian-info.blogspot.com › Pengertian

D. JOURNAL / ARTIKEL ILMIAH

Tuty Budhi Utami, *Kebijakan hukum Pidana daam menanggulangi tindak pidana illegal logging*, 2009

Aminudin, Cecep, *Penegakan Hukum Illegal Logging, Permasalahan dansolusi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan HukumLingkungan di Mataram, 2003.

Ginting, *Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)*, 2001, hal 1

Prasetya, Rudi, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi*, Makalah SeminarNasional kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas HukumUniversitas Diponegoro, 23-24 November 1989.

Reksodiputro, Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi,Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 November1989.